



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 2, No. 2, Tahun 2026

doi.org/10.63822/92q47814

Hal. 420-431

Available online at <https://indojournal.com/index.php/jti/index>

Reartikulasi *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* sebagai Konseling Sosial Emansipatoris: Fondasi Teologi Transformatif Anti-Penindasan

Nayla Nurfadillah¹, Muh. Hamidi², Ali Hasan³

Bimbingan Konseling Islam, Dakwah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespodensi: naylanurfadillah920@gmail.com

Diterima: 29-05-2026 | Disetujui: 07-06-2026 | Diterbitkan:09-06-2026

ABSTRACT

The Rearticulation of Amar Ma'ruf Nahi Munkar as Emancipatory Social Counseling: Toward a Transformative Anti-Oppression Theology. This article examines the rearticulation of amar ma'ruf nahi munkar as an emancipatory social counseling paradigm grounded in transformative anti-oppression theology. The study is motivated by the tendency to interpret amar ma'ruf nahi munkar primarily as an instrument of individual moral control, limiting its potential as a framework for addressing structural injustice and social oppression. The objective of this study is to analyze the concept of amar ma'ruf nahi munkar from the perspective of transformative Islamic theology and to formulate a prophetic-emancipatory counseling model that integrates theological, psychological, and sociological dimensions. This research employs a qualitative approach based on library research using a critical-hermeneutic method. Data sources include the Qur'an, Hadith, classical exegetical works, Sufi and Islamic philosophical literature, as well as contemporary academic publications relevant to the topic. The analysis is conducted through textual interpretation, contextual analysis, and conceptual reconstruction. The findings reveal that amar ma'ruf nahi munkar possesses significant potential as a mechanism of critical consciousness that encourages both personal transformation and social change. The integration of divine values, self-awareness, and collective action produces a prophetic-emancipatory counseling model characterized by dialogue, participation, and liberation-oriented transformation. The novelty of this article lies in repositioning amar ma'ruf nahi munkar from a normative moral doctrine into a social counseling framework capable of linking religious reflection, the internalization of prophetic values, and social transformation within the broader discourse of transformative anti-oppression theology.

Keywords: *Amar Ma'ruf Nahi Munkar; Emancipatory Social Counseling; Transformative Theology; Anti- Oppression; Prophetic Counseling*

ABSTRAK

Reartikulasi *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* sebagai Konseling Sosial Emansipatoris: Fondasi Teologi Transformatif Anti-Penindasan. Artikel ini membahas reartikulasi *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai paradigma konseling sosial emansipatoris yang berlandaskan teologi transformatif anti-penindasan. Kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa praktik *amar ma'ruf nahi munkar* sering kali dipahami secara sempit sebagai kontrol moral individual, sehingga belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial yang mampu merespons berbagai bentuk penindasan struktural. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dalam perspektif teologi transformatif serta merumuskan model konseling profetik-emansipatoris yang mengintegrasikan dimensi teologis, psikologis, dan sosiologis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan

dengan metode hermeneutik-kritis. Sumber data terdiri atas Al-Qur'an, Hadis, kitab tafsir klasik, literatur tasawuf dan filsafat Islam, serta berbagai publikasi akademik kontemporer yang relevan. Analisis dilakukan melalui tahapan interpretasi tekstual, analisis kontekstual, dan rekonstruksi konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar memiliki potensi sebagai mekanisme penyadaran kritis yang mendorong transformasi individu sekaligus perubahan sosial. Integrasi nilai wahyu, kesadaran diri, dan aksi kolektif menghasilkan model konseling profetik-emansipatoris yang bersifat dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada pembebasan. Kebaruan artikel ini terletak pada reposisi amar ma'ruf nahi munkar dari doktrin moral normatif menjadi instrumen konseling sosial yang mampu menghubungkan refleksi keagamaan, internalisasi nilai profetik, dan transformasi sosial dalam kerangka teologi transformatif anti-penindasan.

Katakunci: Amar Ma'ruf Nahi Munkar; Konseling Sosial Emansipatoris; Teologi Transformatif; Anti-Penindasan; Konseling Profetik

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nurfadillah, N., Hamidi, M., & Hasan, A. (2026). Reartikulasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai Konseling Sosial Emansipatoris: Fondasi Teologi Transformatif Anti-Penindasan. *Jurnal Teologi Islam*, 2(2), 420-431. <https://doi.org/10.63822/92q47814>

PENDAHULUAN

Realitas sosial kontemporer memperlihatkan bahwa penindasan tidak hanya bertahan sebagai residu historis, tetapi justru mengalami transformasi dalam bentuk yang semakin kompleks dan sistemik. Ketimpangan ekonomi global, dominasi kultural berbasis kekuasaan, serta marginalisasi kelompok rentan menunjukkan bahwa modernitas tidak secara otomatis melahirkan keadilan, melainkan seringkali mereproduksi bentuk-bentuk baru ketidakadilan struktural. Pada masyarakat Muslim, problem ini menjadi semakin paradoks karena nilai-nilai normatif Islam secara eksplisit menegaskan prinsip keadilan (*al-'adl*), kesetaraan (*al-musāwah*), dan pembebasan (*tahrīr*). Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya teraktualisasi sebagai kekuatan transformasi sosial yang efektif.

Konsep *amar ma'ruf nahi munkar*, yang secara teologis mengandung mandat etis untuk membangun tatanan sosial yang adil, seringkali direduksi menjadi praktik moralistik yang bersifat individual dan simbolik, alih-alih menjadi instrumen perubahan struktural. Studi mutakhir menunjukkan bahwa implementasi *amar ma'ruf nahi munkar* masih cenderung berorientasi pada kontrol sosial normatif dan belum berkembang sebagai mekanisme emansipatoris yang mampu menyentuh akar ketidakadilan sosial. Hal ini mengindikasikan adanya problem mendasar dalam artikulasi teologi Islam sebagai praksis sosial yang membebaskan (Batubara & Sikumbang, 2025).

Lima tahun terakhir ini, kajian tentang teologi transformatif dan praksis keagamaan mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam upaya mengintegrasikan dimensi spiritual dengan isu-isu keadilan sosial. Sejumlah penelitian menekankan pentingnya rekonstruksi teologi agar lebih responsif terhadap problem kontemporer, seperti ketidakadilan gender, marginalisasi sosial, dan krisis kemanusiaan. Contoh rekonstruksi teologi Islam berbasis nilai keadilan dan kebebasan menunjukkan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* dapat menjadi fondasi etika untuk membangun kesadaran kritis dan perubahan sosial yang inklusif (Jamilah & Saleh, 2025). Selain itu, pendekatan spiritual-humanistik dalam pendidikan Islam juga menegaskan bahwa internalisasi nilai-nilai profetik mampu membangun kesadaran individu dan kolektif dalam menghadapi realitas ketertindasan (Wibowo, 2025).

Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih beroperasi dalam kerangka normatif atau pedagogis, tanpa mengembangkan model operasional yang sistemik untuk mentransformasikan kesadaran tersebut menjadi praksis sosial yang terstruktur. Di sisi lain, studi tentang komunikasi dan dakwah Islam menunjukkan bahwa pendekatan *amar ma'ruf nahi munkar* masih didominasi oleh metode persuasif atau normatif, dengan keterbatasan dalam mengintegrasikan dimensi psikologis dan sosial secara holistik (Jamilah & Saleh, 2025). Meskipun terdapat kemajuan dalam wacana teologi transformatif, masih terdapat kekosongan dalam pengembangan paradigma yang mampu menghubungkan teologi dengan mekanisme perubahan sosial yang konkret dan berkelanjutan.

Celah penelitian (*research gap*) terletak pada absennya kerangka konseptual yang secara integratif menggabungkan dimensi teologis, psikologis, dan sosiologis dalam satu model praksis pembebasan. Kajian tentang *amar ma'ruf nahi munkar* masih terfragmentasi antara pendekatan normatif, pedagogis, dan komunikatif, tanpa menghasilkan sintesis metodologis yang dapat dioperasionalkan sebagai strategi transformasi sosial. Pendekatan konseling dalam konteks Islam cenderung berfokus pada aspek individual-psikologis dan belum dikembangkan sebagai instrumen perubahan sosial yang emansipatoris.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana konsep amar ma'ruf nahi munkar dapat direartikulasi sebagai paradigma konseling sosial yang emansipatoris dalam perspektif teologi transformatif Islam? Kedua, bagaimana integrasi dimensi teologis, psikologis, dan sosiologis dapat membentuk model konseling sosial yang berorientasi pada penyadaran kritis dan pembebasan dari struktur penindasan? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep amar ma'ruf nahi munkar sebagai paradigma konseling sosial emansipatoris serta merumuskan model konseptual yang mengintegrasikan nilai-nilai profetik, kesadaran kritis, dan transformasi sosial sebagai fondasi praksis keagamaan yang berkeadilan dan anti-penindasan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini tidak hanya pada reinterpretasi *amar ma'ruf nahi munkar*, tetapi juga pada posisinya sebagai metode konseling sosial yang melampaui pendekatan normatif dan persuasif konvensional. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan dalam literatur dengan menghadirkan model teologi yang tidak berhenti pada tataran doktrinal, melainkan berfungsi sebagai energi praksis yang mampu membangun masyarakat tanpa penindasan. Artikel ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan Studi Islam, khususnya dalam bidang teologi transformatif, filsafat sosial Islam, dan tasawuf sosial, serta memberikan landasan konseptual bagi pengembangan praksis keagamaan yang lebih responsif terhadap tantangan ketidakadilan global kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual-filosofis dan hermeneutik-kritis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak diarahkan pada pengukuran fenomena secara kuantitatif, melainkan pada pemahaman, interpretasi, dan rekonstruksi makna konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam perspektif teologi Islam. Paradigma yang digunakan adalah interpretatif (*interpretivism*), yang memandang realitas sosial sebagai konstruksi makna yang terbentuk melalui interaksi historis, kultural, dan diskursif. Pendekatan hermeneutik-kritis digunakan untuk menafsirkan teks-teks keagamaan sekaligus menghubungkannya dengan realitas sosial kontemporer, sehingga memungkinkan lahirnya formulasi konseptual yang bersifat transformatif dan emansipatoris.

Objek penelitian ini adalah konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam tradisi pemikiran Islam serta kemungkinan reartikulasi konsep tersebut sebagai paradigma konseling sosial emansipatoris yang berorientasi pada pembebasan dari berbagai bentuk penindasan. Penelitian ini tidak dilakukan pada lokasi tertentu karena merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Fokus kajian diarahkan pada teks, gagasan, dan wacana yang berkaitan dengan teologi transformatif, konseling sosial, serta teori pembebasan dalam perspektif Islam.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan normatif konsep amar ma'ruf nahi munkar. Sumber primer juga mencakup kitab-kitab tafsir, karya ulama klasik, serta literatur tasawuf dan filsafat Islam yang membahas konsep keadilan, pembebasan, dan tanggung jawab sosial. Sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan hasil penelitian mutakhir yang membahas teologi transformatif, teori sosial kritis, konseling sosial, serta isu-isu penindasan dan emansipasi. Pemilihan literatur dilakukan secara selektif

berdasarkan relevansi tema, kredibilitas akademik, dan kontribusinya terhadap pengembangan kerangka konseptual penelitian.

Langkah penelitian dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama adalah pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi dan menghimpun literatur yang relevan dengan tema penelitian. Tahap kedua adalah klasifikasi data berdasarkan tema-tema utama, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, teologi transformatif, teori penindasan, dan konseling sosial emansipatoris. Tahap ketiga adalah analisis hermeneutik-kritis yang dilakukan dengan menafsirkan teks-teks normatif dan literatur akademik secara kontekstual untuk menemukan hubungan antara nilai-nilai teologis dan realitas sosial kontemporer. Tahap keempat adalah rekonstruksi konseptual, yaitu penyusunan model konseptual yang mengintegrasikan dimensi teologis, psikologis, dan sosiologis dalam kerangka konseling profetik-emansipatoris.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan hermeneutik-kritis dan konstruktif. Analisis dimulai dari interpretasi makna normatif teks, dilanjutkan dengan pembacaan kontekstual terhadap fenomena sosial yang berkaitan dengan penindasan dan ketidakadilan, kemudian diakhiri dengan proses sintesis untuk menghasilkan paradigma konseptual baru. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya dialog antara teks keagamaan, tradisi intelektual Islam, dan tantangan sosial kontemporer sehingga menghasilkan pemahaman yang tidak hanya normatif, tetapi juga transformatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaknaan terhadap amar ma'ruf nahi munkar selama ini cenderung berorientasi pada dimensi moral individual sehingga aspek sosial dan transformatifnya sering kali kurang mendapatkan perhatian. Padahal, berbagai problem sosial kontemporer menunjukkan perlunya pendekatan keagamaan yang mampu menjembatani antara nilai-nilai normatif dan upaya perubahan sosial yang konkret. Atas dasar tersebut, pembahasan mengenai amar ma'ruf nahi munkar perlu ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran kritis, pemberdayaan sosial, dan perjuangan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang masih berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

Reartikulasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai Paradigma Konseling Sosial Emansipatoris dalam Perspektif Teologi Transformatif Islam

Dalam konteks filsafat modern dan kontemporer, pemikiran Jürgen Habermas memberikan kontribusi penting dalam memahami keadilan sebagai hasil dari rasionalitas komunikatif. Habermas mengkritik reduksi rasionalitas menjadi instrumen teknokratis dan menekankan pentingnya diskursus sebagai basis legitimasi sosial. Dalam perspektifnya, keadilan hanya dapat dicapai melalui proses komunikasi yang bebas dari dominasi, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pembentukan norma.³ Namun demikian, kritik terhadap Habermas menunjukkan bahwa pendekatan diskursif ini masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau dimensi spiritual dan afektif manusia. Dalam konteks ini, integrasi dengan tradisi Islam menjadi relevan, karena Islam tidak hanya menekankan rasionalitas, tetapi juga dimensi transendental sebagai sumber legitimasi etis. Oleh karena itu, kerangka teoretis artikel ini mengadopsi pendekatan Habermasian sebagai basis analisis kritis, sekaligus melampauinya melalui integrasi nilai-nilai profetik yang bersumber dari wahyu.

Selain Habermas, pemikiran Michel Foucault memberikan perspektif penting mengenai relasi antara kekuasaan dan pengetahuan dalam konstruksi keadilan. Foucault menunjukkan bahwa apa yang dianggap sebagai “kebenaran” dalam masyarakat seringkali merupakan hasil dari praktik diskursif yang didominasi oleh relasi kuasa tertentu. Dalam konteks ini, keadilan tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan yang membentuknya. Studi mutakhir menunjukkan bahwa media dan institusi sosial berperan sebagai aparatus diskursif yang mereproduksi ketidakadilan melalui mekanisme legitimasi simbolik (Qudratullah et al., 2025). Dengan demikian, kerangka teoretis artikel ini mengadopsi pendekatan Foucauldian untuk mengidentifikasi bagaimana keadilan direduksi dan dimanipulasi dalam struktur sosial kontemporer. Namun, berbeda dari Foucault yang cenderung deskriptif-kritis, artikel ini melangkah lebih jauh dengan menawarkan dimensi normatif melalui integrasi nilai-nilai Islam, sehingga kritik terhadap kekuasaan tidak berhenti pada dekonstruksi, tetapi juga mengarah pada rekonstruksi.

Sementara itu, pemikiran Hannah Arendt memberikan kontribusi dalam memahami krisis keadilan dalam konteks modernitas politik. Arendt menunjukkan bahwa hukum modern sering mengalami “juridifikasi”, yaitu reduksi hukum menjadi prosedur teknis yang kehilangan dimensi moral dan politiknya (Zuberi & Susewind, 2024). Fenomena ini relevan dalam konteks masyarakat kontemporer, di mana hukum sering digunakan sebagai instrumen kekuasaan yang justru memperkuat ketidakadilan. Dalam perspektif ini, keadilan tidak lagi berfungsi sebagai prinsip pembebasan, melainkan sebagai mekanisme kontrol sosial. Kerangka teoretis artikel ini memanfaatkan analisis Arendt untuk menjelaskan bagaimana krisis keadilan terjadi akibat depolitisasi dan dehumanisasi hukum. Namun, berbeda dari pendekatan Arendt yang bersifat sekuler, artikel ini mengintegrasikan dimensi spiritual sebagai basis rekonstruksi keadilan, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai sistem regulasi, tetapi juga sebagai sarana aktualisasi nilai-nilai etis-transendental.

Dalam ranah teori kritis, pemikiran Herbert Marcuse melengkapi analisis dengan menyoroti bagaimana sistem sosial modern menciptakan “kesadaran semu” (false consciousness) yang menghambat emansipasi manusia. Marcuse menegaskan bahwa pembebasan tidak hanya membutuhkan perubahan struktural, tetapi juga transformasi kesadaran individu. Perspektif ini sejalan dengan tradisi tasawuf dalam Islam, yang menekankan pentingnya transformasi batin (tazkiyatun nafs) sebagai prasyarat perubahan sosial. Dengan demikian, kerangka teoretis artikel ini membangun dialog antara teori kritis Barat dan tasawuf Islam, dengan menempatkan spiritualitas sebagai dimensi integral dalam proses emansipasi. Pendekatan ini juga sejalan dengan perkembangan studi kontemporer yang menekankan pentingnya integrasi antara moralitas, hukum, dan keadilan dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah (Muhammad Faqih Nidzom, Mohammad Muslih & Falah, 2025). Oleh karena itu, keadilan tidak hanya dipahami sebagai distribusi sumber daya, tetapi juga sebagai proses pembebasan yang mencakup dimensi psikologis, spiritual, dan sosial.

Penindasan (*zulm*) bukan sekadar fenomena sosial, melainkan juga konstruksi teologis dan epistemologis yang beroperasi dalam relasi kuasa, kesadaran, dan struktur. Dalam tradisi Islam, *zulm* secara ontologis dipahami sebagai “menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya,” yang mencakup dimensi teologis (syirik), sosial (ketidakadilan), dan eksistensial (ketidakadilan terhadap diri sendiri). Dengan demikian, penindasan tidak dapat direduksi hanya pada relasi dominasi eksternal, tetapi juga mencakup internalisasi nilai yang melanggengkan ketidakadilan. Perspektif ini sejalan dengan analisis kontemporer yang melihat penindasan sebagai fenomena multidimensional yang melibatkan struktur, budaya, dan

kesadaran. Setiap upaya pembebasan harus bersifat integrative menghubungkan transformasi struktur dengan transformasi kesadaran.

Al-Qur'an secara eksplisit menempatkan keadilan sebagai prinsip fundamental kehidupan sosial. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

(“Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penegak keadilan...”) (QS. An-Nisa: 4:135).

Ayat ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga performatif, karena menuntut keterlibatan aktif subjek dalam menegakkan keadilan bahkan terhadap diri sendiri. Dalam tafsir klasik seperti Ibn Kathir dan Al-Qurtubi, ayat ini dipahami sebagai kewajiban universal yang melampaui relasi personal dan mencakup dimensi sosial-politik. Sementara itu, tafsir kontemporer menekankan bahwa keadilan dalam ayat ini bersifat struktural dan menuntut keberpihakan terhadap kelompok tertindas. Konsep keadilan dalam Islam bukan sekadar etika individual, proyek sosial yang menuntut transformasi sistemik.

Al-Qur'an tidak hanya mengutuk penindasan, tetapi juga memberikan mandat aktif untuk membela kelompok tertindas. Firman Allah:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ...

(“Mengapa kamu tidak berjuang di jalan Allah dan membela orang-orang yang tertindas...”) (QS. An-Nisa: 4:75).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pembebasan bukanlah pilihan moral opsional, tetapi kewajiban teologis dan dapat dibaca sebagai legitimasi bagi gerakan sosial yang berorientasi pada keadilan dan pembebasan. Hal ini memperkuat argumen bahwa teologi Islam memiliki potensi emansipatoris yang kuat, namun seringkali tidak diartikulasikan secara praksis dalam konteks modern. Namun demikian, realitas menunjukkan adanya paradoks: meskipun Islam memiliki basis teologis yang kuat untuk menolak penindasan, praktik sosial seringkali justru mereproduksi ketidakadilan. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori hegemoni yang menunjukkan bahwa dominasi tidak hanya dipertahankan melalui kekuatan, tetapi juga melalui internalisasi nilai. Praktik *amar ma'ruf nahi munkar* seringkali direduksi menjadi kontrol moral yang bersifat simbolik, tanpa menyentuh akar struktural penindasan. Studi mutakhir menunjukkan bahwa praktik keagamaan yang tidak kritis justru dapat menjadi alat legitimasi kekuasaan dan memperkuat status quo ketidakadilan. Dengan demikian, diperlukan rekonstruksi konseptual yang mampu mengembalikan fungsi emansipatoris dari konsep tersebut (Panggayuh et al., 2026).

Di sinilah relevansi pendekatan konseling profetik-emansipatoris sebagai paradigma alternatif. Berbeda dengan pendekatan normatif yang bersifat top-down, model ini menekankan proses penyadaran kritis (*conscientization*) sebagai inti perubahan sosial. *Amar ma'ruf nahi munkar* tidak lagi dipahami sebagai tindakan menghakimi, tetapi sebagai proses dialogis yang bertujuan membangun kesadaran individu dan kolektif. Pendekatan ini sejalan dengan teori pedagogi kritis yang menekankan pentingnya refleksi dan aksi dalam proses pembebasan. Konseling adalah medium transformasi yang menghubungkan dimensi personal dengan perubahan sosial. Paradigma ini juga mengintegrasikan dimensi spiritual sebagai

basis transformasi (Rahmah & Mahmud, 2026). Dalam tradisi tasawuf, perubahan sosial tidak dapat dipisahkan dari transformasi batin individu. Konsep *tazkiyat al-nafs* (penyucian jiwa) menjadi prasyarat bagi pembebasan sosial, karena penindasan seringkali berakar pada penyakit spiritual seperti keserakahan, kesombongan, dan ketidakadilan. Teologi transformatif tidak hanya berfungsi sebagai kritik terhadap struktur eksternal, tetapi juga sebagai kritik terhadap kondisi internal manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pembebasan dalam Islam bersifat holistic (Syawalia et al., 2026). Al-Qur'an juga menawarkan narasi pembebasan yang bersifat historis dan universal. Firman Allah:

وَأُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ...

(“Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi...”) (QS. Al-Qasas: 28:5).

Ayat ini menunjukkan bahwa pembebasan bukan hanya proyek manusia, tetapi juga bagian dari sunnatullah dalam sejarah. Berdasarkan perspektif teologi pembebasan, ayat ini dapat dipahami sebagai legitimasi teologis bagi perjuangan sosial yang berpihak pada kelompok marginal. Teologi tidak bersifat pasif, tetapi aktif dalam mendorong perubahan sosial. Namun, dalam praktiknya, gerakan sosial yang berbasis agama seringkali mengalami reduksi menjadi gerakan moralistik atau bahkan politis yang kehilangan dimensi spiritualnya. Hal ini menimbulkan krisis epistemologis dalam memahami hubungan antara agama dan perubahan sosial. Studi terbaru menunjukkan bahwa gerakan keagamaan yang tidak memiliki basis refleksi kritis cenderung terjebak dalam reproduksi ideologi dominan dan gagal menghasilkan perubahan yang substantif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan dimensi refleksi kritis dengan aksi sosial.

Konseling profetik-emansipatoris menawarkan model yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut. Dengan menggabungkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dengan pendekatan konseling, paradigma ini menciptakan ruang dialog yang memungkinkan individu untuk memahami realitas penindasan secara kritis sekaligus menginternalisasi nilai-nilai pembebasan. Proses ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, karena perubahan sosial memerlukan keterlibatan komunitas. Penindasan tidak dapat diatasi hanya melalui perubahan struktural atau moral semata, tetapi memerlukan pendekatan integratif yang menggabungkan dimensi teologis, psikologis, dan sosial. Paradigma konseling profetik-emansipatoris yang dikembangkan dalam artikel ini menawarkan kontribusi teoretis yang signifikan dengan menghadirkan model baru dalam diskursus teologi transformatif. Model ini tidak hanya relevan dalam konteks studi Islam, tetapi juga memiliki implikasi luas dalam kajian sosial dan kemanusiaan global, terutama dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil dan bebas dari penindasan (Fadhilah et al., 2026).

Integrasi Dimensi Teologis, Psikologis, dan Sosiologis dalam Model Konseling Profetik-Emansipatoris

Jika Konsep *amar ma'ruf nahi munkar* tidak dapat lagi dipahami secara sempit sebagai kewajiban moral individual, melainkan harus direkonstruksi sebagai mekanisme transformasi sosial yang berakar pada kesadaran kritis dan praksis emansipatoris. Dalam kerangka ini, penindasan (*zulm*) bukan hanya fenomena

eksternal berupa dominasi struktural, tetapi juga internalisasi nilai yang melanggengkan ketidakadilan. Perspektif ini menemukan resonansinya dalam teologi pembebasan Islam yang dikembangkan oleh pemikir seperti Asghar Ali Engineer dan Ali Shari'ati, yang menegaskan bahwa teologi harus berfungsi sebagai alat kritik terhadap struktur sosial yang menindas dan bukan sekadar legitimasi normatif. Studi mutakhir menunjukkan bahwa teologi pembebasan dalam Islam lahir dari kegelisahan terhadap ketimpangan sosial dan berupaya mentransformasikan nilai tauhid menjadi praksis sosial yang membebaskan. Reinterpretasi *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai konseling sosial emansipatoris merupakan upaya epistemologis untuk mengembalikan fungsi transformatif teologi dalam konteks kontemporer (Balkis et al., 2024).

Dalam perbandingan dengan studi global, pendekatan ini memiliki irisan kuat dengan tradisi liberation theology di Amerika Latin dan teori kritis dalam ilmu sosial modern. Dalam konteks global, teologi pembebasan tidak hanya berfungsi sebagai refleksi teologis, tetapi juga sebagai praksis politik yang berpihak pada kelompok tertindas. Pemikiran Farid Esack, misalnya, menunjukkan bagaimana hermeneutika Al-Qur'an dapat digunakan sebagai alat pembebasan dalam konteks apartheid di Afrika Selatan, dengan menempatkan teks sebagai sumber kritik terhadap ketidakadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hermeneutik tidak hanya bersifat interpretatif, tetapi juga performatif mendorong perubahan sosial melalui reinterpretasi makna. Pendekatan konseling profetik-emansipatoris yang diusulkan dalam artikel ini memperluas horizon teologi pembebasan dengan memasukkan dimensi psikologis sebagai bagian integral dari proses transformasi, sesuatu yang relatif kurang mendapat perhatian dalam studi global sebelumnya (Randa, 2023).

Implikasi teoretis dari pendekatan ini sangat signifikan, terutama dalam memperluas cakupan teologi Islam dari domain normatif menuju domain praksis-transformatif. Dengan mengintegrasikan dimensi teologis, psikologis, dan sosiologis, paradigma ini menawarkan kerangka konseptual baru yang mampu menjelaskan hubungan antara kesadaran individu dan perubahan sosial. Dalam kerangka ini, *amar ma'ruf nahi munkar* tidak lagi dipahami sebagai tindakan korektif yang bersifat reaktif, tetapi sebagai proses dialogis yang membangun kesadaran kritis dan mendorong aksi kolektif. Pendekatan ini juga menggeser fokus dari "menghakimi" menuju "mendampingi," sehingga menciptakan ruang etis yang lebih inklusif dan partisipatif. Secara epistemologis, hal ini menandai pergeseran dari teologi normatif ke teologi performatif, di mana kebenaran tidak hanya dipahami, tetapi juga diwujudkan dalam praksis sosial.

Dalam isu kemiskinan struktural di masyarakat Muslim, pendekatan konseling profetik-emansipatoris dapat digunakan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap faktor-faktor struktural yang menyebabkan kemiskinan, sekaligus mendorong aksi kolektif untuk mengatasinya. Studi tentang relevansi pemikiran Ali Shari'ati menunjukkan bahwa kemiskinan tidak dapat dipahami sebagai takdir, tetapi sebagai hasil dari struktur sosial yang tidak adil yang harus diubah melalui kesadaran dan aksi sosial (Yuwono, 2025). Dalam konteks ini, konseling tidak hanya berfungsi sebagai terapi individu, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan sosial yang mampu menghubungkan pengalaman personal dengan struktur sosial yang lebih luas.

Contoh kontekstual lainnya dapat ditemukan dalam isu ketidakadilan gender, di mana interpretasi keagamaan seringkali digunakan untuk melegitimasi subordinasi perempuan. Pendekatan konseling profetik-emansipatoris dapat berfungsi sebagai ruang dialog yang memungkinkan reinterpretasi teks keagamaan secara kritis dan kontekstual, sehingga membuka kemungkinan bagi pembebasan perempuan dari struktur patriarki. Studi mutakhir menunjukkan bahwa interpretasi yang bias gender dalam teks

keagamaan seringkali menjadi sumber legitimasi bagi ketidakadilan sosial, sehingga diperlukan pendekatan hermeneutik yang kritis dan kontekstual untuk mengatasinya. Dengan demikian, paradigma ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki potensi aplikatif yang luas dalam berbagai isu sosial (Gillo, 2021).

Teologi yang tidak kritis cenderung menghasilkan sikap intoleran dan eksklusif yang justru memperkuat konflik sosial. Sebaliknya, pendekatan konseling profetik-emansipatoris menawarkan model yang lebih inklusif dan dialogis, yang menekankan pentingnya refleksi kritis dan keterbukaan terhadap perbedaan. Studi terbaru menunjukkan bahwa pemahaman teologi yang kaku dapat menghasilkan sikap diskriminatif dan eksklusif dalam masyarakat, sehingga diperlukan rekonstruksi teologi yang lebih kontekstual dan inklusif. Dengan demikian, paradigma ini dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih toleran dan inklusif. Pendidikan dapat dipahami sebagai proses konseling sosial yang bertujuan membangun kesadaran kritis dan mendorong aksi sosial. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pendidikan kritis yang menekankan pentingnya dialog, refleksi, dan aksi dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, paradigma konseling profetik-emansipatoris dapat menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang lebih transformatif dan kontekstual (Azis, 2024).

Implementasi paradigma ini tidak bebas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap perubahan, terutama dari kelompok yang diuntungkan oleh status quo. Selain itu, terdapat juga tantangan epistemologis dalam mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu yang memiliki paradigma yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan paradigma ini dalam berbagai konteks sosial. Rekonstruksi *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai konseling sosial emansipatoris bukan hanya sebuah inovasi konseptual, tetapi juga sebuah kebutuhan epistemologis dan praksis dalam menghadapi realitas penindasan kontemporer. Paradigma ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam memahami dan mengatasi penindasan. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori, tetapi juga menawarkan model praksis yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan bebas dari penindasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* pada hakikatnya tidak hanya dapat dipahami sebagai kewajiban moral yang berorientasi pada pengawasan perilaku individu, tetapi juga sebagai paradigma konseling sosial emansipatoris yang memiliki fungsi transformatif. Reartikulasi konsep ini menunjukkan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* mengandung potensi besar sebagai mekanisme penyadaran kritis yang mendorong individu dan masyarakat untuk mengenali, mengkritisi, serta mengubah berbagai bentuk penindasan yang bersifat struktural maupun kultural. Pemahaman tersebut menegaskan bahwa ajaran Islam tidak berhenti pada dimensi normatif, melainkan memiliki orientasi praksis dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembebasan manusia dari ketidakadilan. Konstruksi model konseling profetik-emansipatoris terbentuk melalui integrasi dimensi teologis, psikologis, dan sosiologis. Dimensi teologis memberikan landasan nilai berupa keadilan, tauhid, dan keberpihakan kepada kelompok *mustadh'afin*. Dimensi psikologis berfungsi

*Reartikulasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai Konseling Sosial Emansipatoris: Fondasi Teologi Transformatif
Anti-Penindasan*
(Nurfadillah, et al.)

membangun kesadaran kritis serta transformasi diri melalui proses refleksi dan internalisasi nilai-nilai profetik. Dimensi sosiologis mengarahkan kesadaran tersebut ke dalam aksi kolektif yang mampu mendorong perubahan sosial secara nyata. Integrasi ketiga dimensi tersebut menghasilkan model konseling sosial yang dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada transformasi struktur penindasan. Kebaruan gagasan ini terletak pada reposisi amar ma'ruf nahi munkar dari doktrin moral normatif menjadi instrumen konseling sosial yang menghubungkan refleksi keagamaan, penyadaran kritis, dan praksis pembebasan dalam kerangka teologi transformatif anti-penindasan. Pengembangan paradigma konseling profetik-emansipatoris perlu dilanjutkan melalui kajian empiris dan aplikatif agar dapat diimplementasikan secara lebih konkret dalam bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan gerakan sosial keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, A. (2024). TEOLOGI PEMBEBASAN DAN IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM (TELAAH PEMIKIRAN HASSAN HANAFI). *Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 186–201.
- Balkis, L. H., Saputra, A., Nurhamidah, W. I., & Azizatul, N. (2024). Pendekatan Hermeneutik dalam Pengkajian Islam : Perspektif Pendidikan Agama Islam Kontekstual. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3(3).
- Batubara, J. A., & Sikumbang, A. T. (2025). Komunikasi Islam dalam Penegakan Amar Ma ' ruf Nahi Munkar. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(2), 916–924.
- Fadhilah, N., Widad, S., & Siswanto, A. H. (2026). Dari Normativitas ke Emansipasi : Rekonstruksi Amar Ma ' ruf Nahi Munkar sebagai Paradigma Konseling Profetik dalam Kerangka Teologi Kritis. *Journal of Islamic Studies (JIS)*, 1(1), 23–31.
- Gillo, M. D. (2021). Fundamentals of Hermeneutics as A Qualitative Research Theoretical Framework. *European Journal of Education and Pedagogy*, 2(3), 42–45.
- Jamilah, S., & Saleh, M. (2025). GENDER-RESPONSIVE MORAL EDUCATION: FROM TAWHID TO AMAR MA"RUF NAHI MUNKAR. *TPM-Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology*, 32(4), 1130–1138.
- Muhammad Faqih Nidzom, Mohammad Muslih, M., & Falah, Z. N. (2025). CRITICAL THEORY AND SOCIAL SCIENCE : A PHILOSOPHICAL COMPARISON OF HERBERT MARCUSE AND JÜRGEN HABERMAS In the 20th century , Europe was confronted with a conflict of changes. *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, 11(2), 383–402.
- Panggayuh, B. P., Fahrunnisa, A., Ananda, D. B., & Al, M. T. (2026). Dinamika Feodalisme Beragama : Peran Agama Dalam Struktur Sosial. *Akhlak: Journal of Education Behavior and Religious Ethics*, 2(1), 110–118.
- Qudratullah, Nohong, M., Iqbal, M., Susanti, R., & Alkanan, O. M. T. (2025). Towards Discursive Justice: An Integrative Foucault-Islam Framework for Critical Media Discourse Analysis in Justice Issues. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 23(1), 156–169. <https://doi.org/10.30984/jis.v23i1.3196>
- Rahmah, S. M., & Mahmud, H. (2026). Pengawasan dalam Dakwah: Memahami Konsep 'Amr Ma'ruf Nahi Munkar' dalam Alquran. *Reflektika*, 20(2), 1038–1045.
- Randa, S. (2023). Hermeneutika Pembebasan Farid Esack. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 21(1), 127–146.
- Syawalia, S., Octavia, I., Auliya, M., & Siswanto, A. H. (2026). TAZKIYATUN NAFS EMANSIPATORIS SEBAGAI BASIS TEOLOGI TRANSFORMATIF : KRITIK ATAS REDUKSI TEOLOGI. *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 447–456.

Reartikulasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai Konseling Sosial Emansipatoris: Fondasi Teologi Transformatif Anti-Penindasan
(Nurfadillah, et al.)

- Wibowo, A. (2025). Humanisation of Spiritual Education in Fostering Marginalized Communities at Majelis Ta'lim Sabilu Taubah. *Jurnal Keislaman*, 8(1), 148–161.
- Yuwono, A. A. (2025). Relevansi Teologi Pembebasan Ali Syari'ati dalam Mengatasi Kemiskinan Umat Islam di Indonesia: Sebuah Pendekatan Reflektif. *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 6(1), 113–131.
- Zuberi, F., & Susewind, R. (2024). Totalitarian Law and Communal Ghettoisation: An Arendtian Perspective. *Social and Legal Studies*, 33(5), 748–766. <https://doi.org/10.1177/09646639241266756>